

Laporan Utama: Babad Korupsi, Nama Besar Belum Disasar

Edisi Juli 2025

fanzine

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA



Pilkada (Ulang) Pangkalpinang:
**PROF UDIN, SANG
PROFESOR KERAKYATAN!**



SBLNET.ID
SURYA BESTARI LESTARI

www.sblnet.id

INTERNET DEDICATED PKS KEMITRAAN

Belum Punya OLT? Kami Siapkan?

FASILITAS

- ① Bandwidth Dedicated 1:1
- ② Legalitas PKS
- ③ IP Public (1 IP)
- ④ System Billing (Add On)
- ⑤ Free ID Card
- ⑥ NOC Support 7x24 Jam
- ⑦ 100% Fiber Optic Full Metro Telkom
- ⑧ Free Consultant Network

100 Mbps

start from

Rp **3.000.000,-**

KHUSUS WILAYAH:

- Jabodetabek
- Jawa Barat

contact person



0813-9997-7707

Izin aktivitas telokomunikasi
dengan kabel: 23112301179640001

Izin terbit ISP:
23112301179640002

Semangat Baru aktual Reborn

Memasuki pertengahan tahun 2025 ini majalah aktual kembali hadir menyapa para pembaca setianya. Kami hadir kembali dengan semangat baru. Menyajikan berita mendalam, analisis dari berbagai perspektif, sehingga memperkaya wawasan.

Semangat itu kami usung dalam kerangka kerja "aktual reborn". Lahir dengan semangat menjadi media pengontrol kekuasaan, mengkritik kebijakan pemerintah, semata demi kepentingan publik.

Majalah aktual edisi "reborn" kali ini menyajikan laporan utama seputar pemberantasan korupsi kasus kakap yang ditangani Kejaksaan Agung, KPK dan kepolisian di era Pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah pemberantasan itu efektif mengembalikan kerugian negara dan menyasar nama-nama besar yang selama ini unthouchable.

Edisi ini juga mengupas seputar pilkada ulang kota Pangkalpinang. Pilkada yang menjadi sejarah lantaran pada 2024, kotak kosong menjadi pemenang mengalahkan calon incumbent.

Kini, Pilkada ulang diikuti oleh empat pasangan calon. Tiga pasangan diusung oleh partai politik. Satu pasangan dari jalur independen. Calon yang kalah oleh kotak kosong pun kembali maju diusung partai besar.

Sajian lain yang tak kalah penting untuk dibaca adalah perang dunia. Irsn vs Israel, dan juga persaingan pengaruh antara Amerika Serikat vs China.

Selamat membaca. Salam.
Redaksi aktual

Daftar Isi

Laporan Utama

Babad Korupsi Setengah Hati, Nama Besar Belum Disasar	4
Ada Political Barrier Penuntasan Kasus Korupsi Kakap, Kejagung Jangan Nyerah	8
YLBH: KPK Ecek-Ecek kalau Cuma Bermain di Level Korporasi dan Pemprov	9

Laporan Khusus

Peluang Pilkada Pangkalpinang: Prof Udin, Kekuatan Gagasan & Mesin Partai	11
Pilkada Ulang Pangkal Pinang 2025: Petahana Ditantang Poros Perubahan	13
Prof. Udin Soroti Kota yang Sakit, Mahal, dan Timpang: Pangkalpinang Harus Berbenah	15

Wawancara Bersama Prof. Saparudin Masyarif	18
Dukungan Mengalir untuk Prof. Udin-Dessy, Akar Rumput Pangkalpinang Suarakan Harapan Baru	21

Dunia Aktual

Indonesia Diantara Pusaran Konflik Iran-Israel dan Kebijakan Trump	24
---	----

Dialektika

Budaya, Syariat, dan Dentuman yang Mengusik	24
---	----

Analisis

Ekonomi di Persimpangan: Antara Astacita dan Realitas	26
--	----

Nasional

.....	28
-------	----

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Direktur Utama: Andy Abdul Hamid **Pemimpin Umum:** Tino Oktaviano **Pimpinan Redaksi:** M Malik **Redaktur Investigasi:** Eka Permadhi
Redaktur Fanzine: Andry Haryanto **Redaktur Medsos:** Al Jalil **Redaktur Videofrafis:** Saiful **Redaktur:** Indra Bonaparte **Reporter:** Rizky Zulkarnain, Sandi Setyawan, Muhammad Khamdi (Pantura Pekalongan) **Reporter investigasi:** Eroby Jawi Fahmi **Kontributor:** Firdy Erliansyah, Nugroho Sentoso, Halimansyah, Danang Wibowo, Ronaldo Jerry, Hary Fauzan (Bekasi), Muhammad Aderman (RIAUI), Ferry Sapto (Batam) **Head Marketing:** Almalludin Sudrajat Muchlica **IT:** Rohadi M Raja **Legal Officer:** DAAR AFKAR & CO. LAWYERS

Alamat Redaksi: Caprof Building Jl. Prof DR Soepomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon** (021) 83706200
E-mail: redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com



foto: aktual.com

Babad Korupsi Setengah Hati, Nama Besar Belum Disasar

SOROT mata publik tertuju ke kantor Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sana, para jaksa disibukan dengan pengusutan kasus-kasus besar yang menjadi buah bibir masyarakat. Bukan saja duit besar yang ditilep, tapi juga nama-nama besar yang ikut terseret dalam pusaran kasus. Namun sejurus itu pula nama-nama besar tersebut menghilang. Tanpa jejak.

“**K**ejagung harus berani panggil dan periksa *dong* nama-nama seperti BA di kasus judi *online*, dan LBP di kasus laptop *chromebook*,” tegas Ketua Yayasan LBH Indonesia Muhammad Isnur, kepada Aktual.com, Kamis, 3 Juli 2025.

BA mengarah pada bekas Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) era

Presiden Joko Widodo, Budi Arie Setiadi. Ketua Umum Pro Jokowi itu saat ini menjabat Menteri Koperasi.

Nama Budi Arie mencuat di ruang persidangan dengan Zulkarnaen Apriliantony bersama bersama Alwin Jabarti Kiemas, Muhrijan alias Agus, dan Adhi Kismanto, dengan nomor perkara PDM-32/JAKSEL/Eku.2/02/2025.

Budi Arie disebut menerima 50 persen dari setoran jatah membekingi situs judol yang disetorkan dan disortir dari 420 situs. Tarif pengamanan dipatok Rp 8 juta per situs yang 'dikawal'.

“Pembagian untuk terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20%, terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30% dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga,” kata jaksa penuntut membacakan dakwaan pertengahan Mei lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) Haryoko Ari Prabowo, mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memeriksa loyalis Jokowi tersebut ke depannya.

“Kita lihat nanti di kepentingan pembuktian,” kata Ari Prabowo.

“Kejagung harus berani tajam ke atas, jangan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Jangan hanya pelaksana atau operatornya saja yang dipanggil, diperiksa. Harus berani juga memanggil dan memeriksa pengambil kebijakannya, yang intervensi kebijakan, dan yang mem-backing-i kebijakannya. Jangan sampai lolos dari pengusutan,” ujar Isnur.

Sedangkan kasus pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tengah diusut Kejaksaan merugikan negara senilai Rp 9,9 triliun yang terdiri dari Rp 3,5 triliun dari satuan pendidikan dan Rp 6,3 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kasus ini terjadi di 2020 di mana Kemen-dikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan perlatan teknologi informasi dan komunikasi untuk satuan pendidikan dasar hingga menengah atas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Harli Siregar, mengatakan bahwa pengadaan serupa juga pernah terjadi pada 2018-2019 dan hasilnya tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan penggunaan *chromebook* mengandalkan jaringan internet. Namun di sisi lain kondisi Indonesia belum setara digital di mana masih banyak daerah yang kesulitan mengakses jaringan internet.

“Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah,” beber Harli, di Kejagung, Senin,



Foto: Inilah.com HO-Dok Kejaung

26 Mei 2025.

Berdasar temuan sebelumnya, tim teknis merekomendasikan menggunakan spesifikasi operating system (OS) Windows. Dalam perjalannya, Kemendikbudristek mengganti kajian pertama tersebut dengan menggunakan spesifikasi operating system Chrome atau Chromebook.

“Sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ. Karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba karena sesungguhnya penggunaan Chromebook itu kurang tepat,” jelas Harli.

Kejagung telah memeriksa staf khusus Nadiem Makarim, bekas Mendikbudristek, dan telah menggeledah apartemen serta tempat tinggal staf khusus tersebut. Penyidik juga telah memeriksa Nadiem sebagai saksi dan mencegahnya ke luar negeri.

Menurut Isnur, harapan besar digantungkan pada Kejagung dalam upaya pemberantasan korupsi dengan tidak hanya membabad operator dalam merampok uang negara, sehingga terkesan orkestrasi di atas panggung semata dengan tujuan mencari popularitas atau populisme hukum.

“Ibaratnya, ya, hangat-hangat tahi ayam. Ramai di awal, tapi melandai, bahkan melemah dalam pengusutannya,” Isnur mengistilahkan.

Isnur optimistis bila Kejagung sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, maka penyidik tidak sekedar berhenti di operator saja.

“Ketika pengungkapan kasus korupsi, Kejagung sebetulnya kan bisa menemukan dan mengungkap elite intelektualnya, sehingga ketika kasus itu selesai Kejagung bisa menuntut lagi elite tersebut. Saya yakin Kejagung bisa kok, media saja bisa mendapatkan dan mengungkapkan pihak mana saja yang terlibat, masa Kejagung tidak bisa?” papar Isnur.

Mahfud MD: Kasus Korupsi Besar Banyak Mentok saat Oligarki Bertemu Politikus

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo Subianto dalam sembilan bulan pasca-dilantik 20 Oktober 2024.

Enambelas kasus korupsi, menurut mantan Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 ini, tengah dikuliti oleh lembaga penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, maupun Polri. Kendati tidak dipungkiri ada hambatan politik yang muncul dalam pengusutan kejahatan kerah putih tersebut.

“Kita harus memaklumi dan apa yang dicapai sekarang harus diapresiasi,” ujar Mahfud dalam program siniar YouTube Mahfud MD Official, yang diunggah pada Selasa 1 Juli 2025.

Adapun 16 kasus korupsi yang saat ini berjalan di lembaga penegak hukum sejak pemerintahan Prabowo, adalah: kasus Zarof Ricar (suap perkara), Tom Lembong (impor gula), pegawai Komdigi (judol), pagar laut, CSR BI, Dirjen Anggaran Kemenkeu, PT Pertamina Patra Niaga, kasus Hasto Kristiyanto, LPEI, Minyak Kita, Bank Jabar Banten (BJB), ekspor CPO (suap hakim), kredit PT Sritex, pengadaan laptop Kemendikbudristek, TPPU Sugar Group Company, dan kasus kuota haji.

Dalam perbincangan tersebut Mahfud menyoroti kasus judol yang hingga saat ini belum menyentuh otak yang mengendalikan judi online. Dalam kasus ini, 23 terdakwa sudah dimeja hijaukan. Otak yang dimaksud adalah bekas Menkominfo Budi Arie Setiadi yang kini menjabat Menteri Koperasi. Nama Budi Arie muncul dalam persidangan para terdakwa.



foto: merdeka.com

Dalam hal ini, jelas Mahfud, jaksa memiliki kewenangan bila hakim memerintahkan menjadikan Budi Arie sebagai tersangka bila bukti-bukti menguatkan adanya keterlibatan loyalis Jokowi tersebut, meski nama Budi Arie tidak muncul dalam berkas penyidikan.

“Jaksa bisa. Jaksa adalah penyidik dalam tindak pidana korupsi. Sudah satu paket,” kata Mahfud.

Akan menjadi persoalan di masyarakat bilamana otak kasus judi online yang merusak setiap orang dibiarkan melenggang bebas. “Kita harus minta kejaksaan, pengadilan untuk mengejar otak ini,” tegas Mahfud.

“Karena ini lebih jelas tanggungjawabnya dari orang yang disuruh. Apalagi kalau sampai Rp 600 triliun, Rp 900 triliun yang merugikan rakyat dan negara,” Mahfud melanjutkan.

Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini berharap Presiden Prabowo bersikap tegas terhadap kasus judol yang merugikan masyarakat banyak, serupa ketika Prabowo meminta hukuman berat pasca putusan ringan yang diberikan hakim kepada terdakwa korupsi timah, Harvey Moeis.

“Saya berharap Pak Prabowo tidak punya political handicap (rintangan politik) untuk

melakukan itu. Nggak ada orang membela Budi Arie kecuali pembelanya. Kalau masyarakat hukum mengatakan itu terlibat, semua mengatakan kecuali pembelanya saja,” ujar Mahfud.

Sementara itu, kasus pagar laut yang menjadi sorotan dan menuai kegaduhan di mana seluruh turun tangan merespons temuan tersebut, mendadak hilang dari pembicaraan publik dan penegak hukum.

“Tiba-tiba sampai sekarang tidak ada kabarnya. Ini yang paling buruk,” kata Mahfud.

Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap anggota medio 2008-2013 ini punya alasan menyatakan demikian. Menurutnya, ketika kasus terungkap ke permukaan namun berbenturan dengan oligarki yang terdiri dari pengusaha-pengusaha yang melabrak aturan bertemu politikus, maka kasus tersebut perlahan tenggelam.

“Padahal itu jelas korupsi, dari sudut apapun,” tegas Mahfud.

Sengkarut argumen dua lembaga penegak hukum, Kejaksaan dan Polri, dalam kasus ini seharusnya dapat diselesaikan bila mana Presiden Prabowo menjadi dirigen dalam kasus yang sempat menyedot perhatian banyak orang.

“Sebaiknya disetel lagi pernyataan perintah Pak Prabowo, pernyataan Menteri ATR bahwa ini (kasus) harus dibersihkan, harus diselesaikan. Pasti sampai sekarang kasus ini tidak jelas. Ini kasus yang mengecewakan,” kata Mahfud.

Dalam kasus ‘Pertamina Oplosan’ yang menjadi buah bibir masyarakat, Mahfud berpendapat kasus yang menyeret sembilan tersangka itu masih menyisir tersangka di tingkat bawah. Kasus yang merugikan negara Rp 193 triliun itu bak kasus pagar laut, di mana oligarki bertemu dengan politikus.

“Logikanya yang di atasnya donk, ini kan hanya pelaksana,” ujar Mahfud.

Laporan Erobey Jawi Fahmi, Andry Heryanto, Eka Permadhi

Ada Political Barrier Penuntasan Kasus Korupsi Kakap, Kejagung Jangan Nyerah

Kejaksanaan Agung (Kejagung) bergerak cepat melakukan bersih bersih korupsi. Pasca sembilan bulan lebih Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Setidaknya ada 16 kasus mega korupsi yang diungkap dan menggegerkan ditangani korep Adhiyaksa selama sembilan bulan terakhir.

Langkah cepat Kejagung mengungkap kasus kakap dengan barang bukti uang tunai triliunan, hingga emas puluhan kilo ini mengundang kagum publik. Sekaligus menimbulkan tanya, terutama dalam kelanjutan penanganan kasus yang dianggap mandeg, oleh ganjalan kekuatan politik.

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melihat hal tersebut. Dan terus memantau proses hukum semua kasus tersebut.

“Memang ada political barrier, atau Handicap yang menghalangi sehingga kita harus memaklumi. Tetapi apa yang dicapai sekarang harus diapresiasi juga,” Mahfud dalam Podkes Mahfud MD Official dengan tema catatan Mahfud MD do 9 Bulan Pemerintahan Prabowo yang di kutip Aktual.com.

Sementara itu, Ketua Yayasan LBH Indonesia Muhammad Isnur menegaskan.

Kejagung tidak boleh pandang bulu dalam menuntaskan kasus korupsi yang sudah diungkap.

“Kejagung harus berani panggil dan periksa dong nama-nama seperti BA di kasus judi online, RC di kasus Pertamina oplosan, dan LBP di kasus laptop chromebook,” kepada Aktual.com.

Menurut Isnur, nama-nama besar yg diduga sebagai aktor utama sangat jelas terungkap dalam fakta persidangan, proses persidangan, maupun pemberitaan di media.

“Jangan hanya pelaksana atau operatornya saja yang dipanggil, diperiksa. Harus berani juga memanggil dan memeriksa pengambil kebijakannya, yang intervensi kebijakan, dan yang mem-backing-i kebijakannya. Jangan sampai lolos dari pengusutan,” tegasnya.

Redaksi aktual.com coba menghubungi pihak Kejaksaan Agung untuk meminta penjelasan proses hukum 16 kasus korupsi yang sedang ditangani. Namun hingga tulisan ini di publikasikan, belum ada tanggapan dari pihak Kejaksaan Agung.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD pun mendorong Kejagung agar tidak takut dalam melakukan pemberantasan korupsi. Karena hal tersebut sesuai komitmen Presiden Prabowo yang disampaikan dalam berbagai pidato, dan di tulis dalam buku Paradoks Indonesia.

“Di halaman 112, Dua tugas besar untuk mewujudkan demokrasi



yang kita dambakan, ada dua katanya. Satu kita harus pastikan supremasi hukum. yang kedua kita harus kejar dan tangkap koruptor,” ungkap Mahfud.

Dengan masih adanya ganjalan, Mahfud berharap Kejaksaan terus berupaya menuntaskan semua kasus mega korupsi yang sudah diungkap,

meskipun tidak mudah dan memerlukan proses panjang.

“Menurut saya, meskipun dengan kekurangannya, kemajuan kemajuan untuk pemberantasan korupsi itu sudah bagus,” jelasnya.

Laporan Eroby Jawi Fahmi, Andry Heryanto, Eka Permadhi

YLBHI: KPK Ecek-Ecek kalau Cuma Bermain di Level Korporasi dan Pemprov

Gegap gempita genderang perang korupsi ditabuh sepanjang sembilan bulan pemerintahan Prabowo Subianto berkuasa. Harapan digantungkan. Belasan kasus besar jadi target penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Di satu sisi masyarakat dapat sumringah manakala para koruptor satu per satu ditangkap dan dibui, namun di sisi lain menjadi pertanyaan besar: efektifkan penanganan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut?

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, mengungkapkan bahwa di satu sisi dia mengapresiasi langkah perang terhadap koruptor yang dilakukan negara. Namun terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian YLBHI dalam langkah tersebut.

Dia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tidak mau ambil risiko dan memilih tantangan kecil dalam pengungkapan rasuah. Teranyar adalah kasus pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Proyek dengan nilai Rp 2,1 triliun ini digadang-gadang merugikan negara hingga Rp 700 miliar.



foto: aktual.com/Tino Oktaviano

“Sepanjang (KPK) main di Pemprov, BUMN, bagi saya itu kecil. Karena tantangan dan risikonya jadi kecil,” kata Isnur dalam siniar *Forum Aktual* yang tayang Sabtu (5/7/2025).

KPK yang lahir dari rahim reformasi seharusnya mampu menjadi *trigger mekanism* manakala aparat penegak hukum yang lain tidak dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

“KPK dianggap berhasil kalau target utama KPK membersihkan aparat penegak hukum. Membersihkan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, itu baru namanya KPK serius,” beber Isnur.

Pembersihan perilaku korupsi di lembaga penegak hukum, menurut dia, dengan otomatis menekan 60 persen praktik korupsi. Analogi yang kerap dipakai adalah bersih-bersih dengan sapu yang bersih.

Selain lembaga penegak hukum, KPK yang lahir dari harapan pemberantasan korupsi menyeluruh juga harus memberikan optimistis kepada masyarakat dalam praktik korupsi politik. Sasarannya tentu bukan sekedar di tingkah paling bawah, tapi pucuk pimpinan partai.

Capaian lain yang seharusnya menjadi indikator KPK dalam pemberantasan korupsi adalah korupsi di sektor sumber daya alam. Bukan tidak mungkin kongkalikong oligarki dan pihak berkuasa bermain dalam sektor basah ini.

Toh kalaupun KPK mengusut kasus di BUMN, komisi rasuah tidak bermain di level bawah. Lebih jauh dia harus mampu mencapai pucuk-pucuk yang terlibat dalam praktik culas pencurian duit rakyat.

“Jadi, kalau ada korupsi di BRI, maka siapakah penanggungjawab utamanya?”

Apakah KPK bisa menyasar politisi yang membantu di parlemen? Harusnya ke situ sasarannya. Jadi, kalau sasarannya hanya korporasi, bagi saya KPK itu targetnya ecek-ecek. Enggak serius,” ungkap Isnur.

Menguji Komitmen Presiden Prabowo Sapu Bersih Korupsi

Presiden Prabowo Subianto sesumbar memberantas korupsi menyeluruh. Namun di sisi lain, kata Isnur, Prabowo membangun ‘jembatan emas’ korupsi dengan memberikan rangkap jabatan para pembantunya di beberapa sektor. Langkah tersebut justru dikhawatirkan akan memunculkan konflik kepentingan.

“Harusimbang antara penindakan dan pencegahan. Bagaimana roadmap-nya terhindar

dari *conflict of interest*. Dan kita belum melihat di separuh pemerintahan ini apa roadmap untuk perbaikan tata kelola birokrasi,” kata Isnur.

Di kasus judi *online*, Isnur mencontohkan, nama bekas Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi disebut dalam dakwaan persidangan. Namun, kejaksaan belum ada tanda untuk menyeret loyalis Jokowi itu ke meja hijau sebagai saksi untuk diperiksa majelis hakim. Lambatnya respons penegak hukum Polri dan Kejagung memroses Budi Arie memunculkan tanda tanya.

“Kekajasaan ragu? Kok enggak cepat diproses?” tanya Isnur.

Dia melihat bahwa kondisi penegakan hukum, khususnya korupsi, belum serius dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Dia melihat bagaimana ‘tradisi’ di Mahkamah Agung memberikan korting pada penegak hukum yang korupsi. Dia mencontohkan kasus Zarof Ricar yang menjadi makelar kasus selama bertahun-tahun namun mendapatkan vonis ringan. Belum lagi kasus Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, yang dua kali terjerat korupsi

“Dunia hukum kita sudah pada level hancur lebur, memalukan sekali,” kata dia.

Isnur melihat bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum belum terorkestrasi dan masing jalan masing-masing dengan membawa agenda lembaga sendiri. Prabowo sebagai presiden diharapkan mejadi dirigen dalam upaya pemberantasan korupsi menyeluruh sesuai dengan komitmen dan janjinya dalam kampanye pemilihan presiden.

“Pak Prabowo kuncinya disini harus menunjukkan dia harus cari orang yang memang punya integritas yang kuat dan dia punya fokus penyelesaian pemberantasan korupsi yang serius,” Isnur mengusulkan.

Laporan Erobey Jawi Fahmi, Andry Heryanto, Eka Permadhi

Peluang Pilkada Pangkalpinang: Prof Udin, Kekuatan Gagasan & Mesin Partai



foto: aktual.com

Pada November 2024, sejarah kecil tapi menggema tercipta di Kota Pangkalpinang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik lokal, kotak kosong mengalahkan pasangan calon tunggal dalam pemilihan wali kota. Hasil rekapitulasi menunjukkan kotak kosong meraih 48.528 suara atau 57,89 persen, meninggalkan pasangan petahana Molen–Hakim dengan hanya 35.177 suara atau 42,02 persen. Kekalahan itu bukan sekadar angka, tapi tanda frustrasi kolektif warga atas terbatasnya pilihan.

Menanggapi fenomena tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menetapkan digelar Pilkada Ulang pada 27 Agustus 2025. Tidak lagi tunggal, kini warga disuguhi empat pasangan calon dengan karakter, kekuatan, dan pendekatan politik yang berbeda-beda. Persaingan menjadi terbuka, dan kali ini tak ada yang boleh menganggap enteng suara diam.

Empat Poros Baru: Dari Mandiri hingga Koalisi Kuat

Pasangan pertama yang mendaftar adalah Eka Mulya Putra dan Radmida Dawam, maju lewat jalur independen dengan mengantongi 17.033 dukungan KTP. Mereka mengusung tagline “Merdeka” dan tampil sebagai simbol keberanian untuk keluar dari dominasi partai. Eka menyebut keikutsertaan mereka sebagai upaya mewujudkan kepemimpinan yang lebih dekat dan bebas dari kepentingan politik besar.

Tak lama setelah itu, Maulan Aklil alias Molen kembali masuk gelanggang. Kali ini ia menggandeng Zeki Yamani, didukung penuh Partai Gerindra yang memiliki 17.360 suara hasil Pileg 2024. Molen mengakui kekalahan sebelumnya sebagai evaluasi besar.

“Kami telah mengevaluasi dengan seksama. Kali ini kami lebih siap dan lebih mendengar,” ujarnya.

Sementara itu, pasangan Basit Sucipto dan Dede Purnama datang membawa dukungan dari lima partai: Golkar, NasDem, PKS, Partai Ummat, dan Partai Buruh. Dengan total 45.238 suara sah dari partai pengusung, mereka tampil sebagai alternatif yang menjanjikan, dengan kombinasi jaringan partai dan pendekatan akar rumput yang intensif.

Namun kekuatan terbesar secara struktural ada di tangan pasangan Saparudin Masyarif dan Dessy Ayutrisna. Diusung oleh enam partai besar: PDIP, PKB, PAN, PPP, Demokrat, dan PKN, mereka mengantongi 57.762 suara sah hasil Pemilu 2024. Kombinasi antara dukungan partai dan figur teknokrat menjadi keunggulan tersendiri.

Prof. Udin dan Gagasan tentang Tata Kelola

Saparudin Masyarif, yang lebih dikenal sebagai Prof. Udin, menonjol bukan hanya karena jumlah dukungan politik, tapi juga karena pendekatan kampanye berbasis data dan pelayanan publik. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari cara kerja birokrasi.

“Ini bukan soal besar kecilnya dukungan partai saja, tetapi bagaimana menghadirkan tata kelola yang berpihak dan transparan,” ujar Prof. Udin dalam konferensi pers usai pendaftaran. Ia memandang Pilkada ulang ini sebagai momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik pada politik.



Foto: Dok. Pribadi

Berbeda dari kandidat lain yang mengandalkan kekuatan elektoral atau popularitas, Prof. Udin memosisikan diri sebagai pemimpin yang mengedepankan prinsip efisiensi, pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan, serta pembenahan pelayanan dasar seperti pendidikan dan administrasi warga. Dalam pidato kampanyenya, ia menyoroti pentingnya menguatkan peran RT/RW sebagai fondasi dari sistem pemerintahan yang responsif.

Dengan karakter dan pendekatan yang berbeda, keempat pasangan calon ini menghadirkan pilihan riil bagi warga Pangkalpinang. Tapi sejarah baru yang tertulis lewat kotak kosong memberi pelajaran penting, bahwa suara publik tidak bisa dianggap remeh, bahkan jika tak bersuara sekalipun.

Kini, pertanyaan besar menggantung di udara: siapa yang mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka bukan hanya layak dipilih, tetapi juga layak dipercaya?

Pilkada Ulang 2025 bukan sekadar ulangan prosedur elektoral, tetapi ujian atas kepercayaan yang pernah runtuh. Dan dalam politik, kepercayaan adalah modal yang tak bisa dibeli, tapi hanya bisa diperjuangkan.

Laporan Erobey Jawi Fahmi dan Andry Heryanto

Pilkada Ulang Pangkal Pinang 2025: Petahana Ditantang Poros Perubahan

Pilkada ulang Kota Pangkalpinang yang akan digelar Agustus 2025 diprediksi menjadi pertarungan terbuka yang sangat dinamis. Kontestasi ini menjadi ajang “perang bintang” antara petahana dan kekuatan baru yang membawa semangat perubahan. Tidak lagi melawan kotak kosong seperti sebelumnya, petahana kini harus menghadapi lawan-lawan yang langsung lahir dari basis protes publik.

Ariandi Zulkarnain, Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, menilai Pilkada ulang ini sebagai koreksi atas kegagalan representasi pada Pilkada 2024 lalu.

“Pilkada ulang Pangkalpinang 2025 akan sangat dinamis, terjadi perang bintang antara petahana melawan mereka yang menyuarakan perubahan pada Pilkada 2024 lalu,” ujar Ariandi kepada Aktual.com.

Ia menjelaskan, pada Pilkada sebelumnya, dinamika politik sebenarnya sudah terasa sejak masa pengusungan calon. Banyak elite politik yang berminat mencalonkan diri, yang terlihat melalui berbagai baliho dan reklame. Namun, dominasi partai politik terhadap petahana menyebabkan aspirasi lain tersumbat.

“Hanya saja, rekomendasi yang dikeluarkan partai politik diberikan ke petahana, sehingga terjadi sumbatan aspirasi elite dan masyarakat yang menginginkan adanya pilihan lain,” katanya.

Dari situ, muncul gerakan memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi tersebut. Masyarakat dan elite yang

kecewa, memilih tidak mengakui pasangan calon tunggal.

“Sekarang, tokoh-tokoh penggerak kotak kosong itu justru bertarung di Pilkada ulang,” lanjut Ariandi.

Menurutnya, inti persoalan di Pangkalpinang adalah kegagalan elite dan partai politik dalam menghadirkan kehendak rakyat melalui pasangan calon yang representatif.

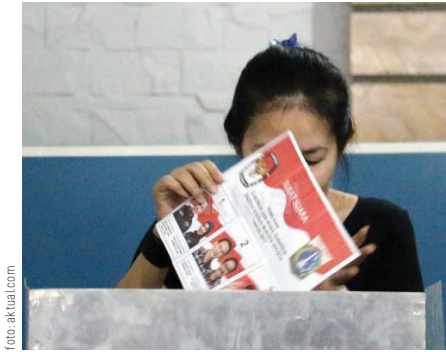
“Maka masyarakat melampiaskannya dengan memilih kotak kosong,” tegasnya.

Hasil riset LP3S turut menguatkan analisis tersebut. Ketika tidak ada pilihan lain dalam bilik suara, rakyat menjadikan kotak kosong sebagai perlawanan terhadap dominasi elite parpol.

“Sehingga kotak kosong bukan hanya simbol. Itu bisa dimaknai sebagai perwujudan rakyat yang menolak pilihan elite. Buktinya, pada Pilkada ulang sekarang muncul empat pasangan calon. Ini menunjukkan bahwa bukan tidak ada orang, tapi selama ini tersumbat oleh elite dan parpol,” jelasnya.



foto: ketikandata.com



Ariandi juga menyoroti pentingnya pasangan calon dalam menentukan elektabilitas. Menurutnya, kontribusi dari figur wakil wali kota sangat menentukan daya tarik pasangan secara keseluruhan.

“Kalau ada pengusaha yang maju tapi wakilnya dianggap tidakimbang, itu bisa menggerus elektabilitas. Pilkada ini akan dinamis, karena ada kocok ulang. Apalagi secara isu makin kompleks, masyarakat makin sadar, pemilih makin cerdas, dan angka partisipasi juga diperkirakan meningkat,” tuturnya.

Ia menyebut, isu utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah soal ekonomi. Karena itu, siapa pun calon yang mampu menjawab persoalan ini dengan program konkret akan lebih dilirik pemilih.

“Setiap calon yang mencoba mem-branding diri mereka aware dalam pembangunan kota, pembangunan ekonomi, penataan tata kota, dan pengelolaan sampah, akan dilirik masyarakat. Karena semua itu merupakan problem utama di Pangkalpinang,” ungkap Ariandi.

Tak hanya itu, Ariandi menekankan pentingnya karakter inklusif dari seorang pemimpin ke depan.

“Kunci pada Pilkada ulang ini adalah munculnya sosok yang progresif dan mampu

membawa perubahan. Kedua, sosok itu harus mampu merangkul. Pangkalpinang ini heterogen, jadi diperlukan pemimpin yang bisa menjaga harmonisasi, bukan hanya mewakili satu kelompok tapi semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Chamad Hojin, Direktur Program Pusat Polling Indonesia (Puspoll), menyatakan bahwa kemenangan kotak kosong pada Pilkada sebelumnya merupakan cerminan kuat bahwa masyarakat menginginkan perubahan.

“Calon petahana melawan kotak kosong dan kalah. Itu sebenarnya sudah menjadi cermin bahwa petahana tidak lagi diinginkan masyarakat. Kembali maju di Pilkada ulang menurut saya terlalu memaksakan diri,” ucap Hojin.

Menurutnya, secara umum ide perubahan sudah dimenangkan oleh rakyat. Tantangannya tinggal bagaimana kandidat di luar petahana bisa menyerap dan menerjemahkan aspirasi perubahan tersebut ke dalam gerakan elektoral.

“Memang survei masih tipis, dan waktunya juga masih cukup. Tapi tinggal siapa yang bisa paling cepat menyuarakan perubahan,” katanya.

Ia menambahkan, kemenangan di Pilkada ulang akan sangat ditentukan oleh kekuatan konsolidasi dan kecepatan sosialisasi.

“Dalam sebulan ini bisa tidak mereka lakukan konsolidasi dan sosialisasi dengan cepat? Harus kuat. Minimal dikenal dan disukai 90 persen lebih. Mesin partai dan relawan juga harus mampu mensosialisasikan program yang membawa suara perubahan,” tegas Hojin.

Dengan empat pasangan calon bertarung dan mayoritas masyarakat belum menentukan pilihan, Pilkada ulang Pangkalpinang menjadi pertarungan terbuka. Siapa pun yang bisa membaca gelombang perubahan dan menerjemahkannya secara konkret—dialah yang akan menang.

Laporan Erobey Jawi Fahmi dan Andry Heryanto



foto: ketikandata.com

Prof. Udin Soroti Kota yang Sakit, Mahal, dan Timpang: Pangkalpinang Harus Lebih Baik

Pangkalpinang tak kekurangan potensi, tapi terlalu banyak dibiarkan pincang.

Itulah pesan besar yang disampaikan Prof. Saparudin, atau yang lebih akrab disapa Prof. Udin, dalam wawancara bersama tim Aktual.com beberapa hari lalu.

Calon Wali Kota Pangkalpinang ini mengajak warga membuka mata atas ragam ketimpangan di jantung ibu kota Bangka Belitung. Mulai dari

layanan publik yang terbatas, birokrasi yang pincang, hingga kota yang makin mahal namun tak menjanjikan penghasilan layak.

“Puskesmas 24 jam hanya ada tiga. Padahal itu bisa jadi tumpuan warga yang butuh rawat inap umum. Sekarang, RSUD jadi penuh karena pasien menumpuk,” beber Prof. Udin mengawali perbincangan.

Dia menyebut minimnya akses kesehatan se-



Foto: Dok. Priadi

bagai penyumbang paling nyata dalam pemerataan layanan dasar. Ditambah lagi, banyak warga yang menunggak iuran BPJS bukan karena lalai, tetapi karena benar-benar tidak mampu.

“Ini bukan soal kemauan. Soal ekonomi,” ujarnya tegas.

Kesenjangan juga menjalar ke dunia pendidikan. Dari sepuluh SMP negeri yang ada di Pangkalpinang, hanya tiga yang dianggap favorit. Sisanya tertinggal jauh dari sisi mutu. Prof. Udin melihat ini sebagai alarm keras atas ketimpangan kualitas pendidikan.

“Padahal semua anak berhak atas pendidikan terbaik. Tapi hari ini yang kuat tambah kuat, yang lain ditinggal,” ujar dia.

Masalah lingkungan tak kalah pelik. Tumpukan sampah di kota itu bukan hanya tak

terkelola, tapi bahkan jadi pemandangan dari udara, menyambut siapapun yang akan mendarat di Pangkalpinang.

“Kalau kita naik pesawat, mau mendarat di bandara, itu sampah kelihatan. Dan baunya pun sering sampai ke terminal kedatangan. Malu kita,” ujarnya getir.

Penataan kota yang semrawut, ruang publik yang dijajah PKL, dan perumahan yang dibangun serampangan turut menyumbang banjir musiman yang tak kunjung diatasi.

Dia menyinggung dugaan jual beli jabatan yang terjadi dalam masa kepemimpinan saat ini. “Ini soal manajemen. Kalau manajerialnya rusak, integritas ikut rusak,” katanya.

Urusan ekonomi tak luput dari sorotan. Prof. Udin menyebut Pangkalpinang sebagai



kota dengan biaya hidup tinggi tapi minim infrastruktur penopang.

Pasokan logistik tersendat akibat pelabuhan pasang-surut. Kapal besar sulit bersandar. Jika air surut, kapal harus menunggu pasang. Biaya distribusi pun melonjak.

“Kondisi ini langsung memengaruhi harga barang. Warga yang jadi korban,” ujarnya.

Kondisi pasar tradisional pun tak kalah menyedihkan. Pasar kaget yang dulu bersifat sementara, kini tumbuh permanen karena lambannya pembangunan pasar resmi. Pasar induk yang ada sempit, dan sebelumnya bahkan bukan dirancang sebagai pasar besar.

“Pengelolaannya pun masih oleh dinas, belum dikelola profesional oleh BUMD. Arah pembenahannya tidak jelas,” tegas dia.

Namun Prof. Udin tak hanya bicara soal kerusakan. Dia juga menawarkan arah baru bagi Pangkalpinang, terutama lewat pengembangan kawasan industri. Menurutnya, kawasan peruntukan industri yang kini belum optimal bisa diangkat statusnya jadi kawasan industri resmi, karena lokasinya sangat strategis, berdampingan langsung dengan pelabuhan.

“Potensi mineral di luar timah juga besar. Kalau ini dikembangkan, kawasan industri jadi

kunci,” katanya.

Tapi semua itu, dia tekankan, tak akan berhasil tanpa pelabuhan yang representatif dan terintegrasi.

Tak banyak yang tahu, Pangkalpinang dilintasi jalur laut tersibuk di Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1. Setiap 10–15 menit, kapal besar dari dan menuju Jakarta, Singapura, hingga Laut China Selatan melintas di Selat Gaspar.

“Kita bisa jadi hub logistik. Bisa pasok air, BBM, atau kebutuhan pokok kapal yang bersandar,” kata Prof. Udin.

Prof. Udin bahkan membuka gagasan agar pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil untuk kota yang jadi simpul pelayaran strategis nasional ini.

Dia juga melihat potensi besar dalam sektor MICE—Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Menurutnya, Pangkalpinang punya nilai lebih sebagai destinasi alternatif.

“Dari Jakarta ke Bali dua jam, ke Pangkalpinang cuma 45 menit. Pantainya indah, makanannya khas, budaya Tionghoa dan Melayu berpadu. Tapi belum pernah dikelola serius,” ujarnya.

Banyak perantau keturunan Tionghoa yang hanya kembali ke Pangkalpinang demi mencicipi kuliner masa kecil mereka.

Namun bagi Prof. Udin, pekerjaan adalah soal terpenting yang dikeluhkan warga. Ia menyoroti fakta bahwa UMR Pangkalpinang adalah tertinggi kedua nasional, Rp3,8 juta, namun penghasilan riil warga, khususnya sektor informal, hanya setengahnya.

“Coba kerja di kedai kopi, mana bisa UMR. Paling 1,5 juta. Ini nggak seimbang. Yang dibutuhkan adalah lapangan kerja dengan penghasilan yang layak,” tegasnya.

Laporan Erobey Jawi Fahmi dan Andry Heryanto



foto: aktual.com/Tino Oktaviano

Wawancara Bersama Prof. Saparudin Masyarif

Wawancara ini dilakukan oleh Tino Oktaviano, Rizal Maulana, dan Eroby Jawi Fahmi bersama Prof. Saparudin Masyarif, calon Wali Kota Pangkalpinang, dalam rangkaian penjajakan visi kandidat jelang Pilkada 2025.

Wawancara berlangsung pada Juli 2025, membahas langsung isu-isu krusial seputar kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Kota Pangkalpinang.

Apa solusi Anda untuk mengurangi penumpukan pasien di RSUD?

Puskesmas yang 24 jam masih kurang. Cuma ada 3 puskesmas yang 24 jam. Harus ditingkatkan jumlahnya puskesmas yang 24 jam, sehingga bisa menampung pasien rawat inap yang umum, jadi tidak menumpuk di RSUD.

BPJS banyak masyarakat yang menunggak karena tidak mampu bayar. Faktor ekonomi sehingga tidak mampu bayar.



foto: aktual.com/Tino Oktaviano

Bagaimana pemerataan kualitas pendidikan bisa diwujudkan?

Lebih kepada persoalan mutu pendidikan yang belum merata, jomplang satu sekolah dengan sekolah lain. SMP ada 10, tapi yang favorite hanya 3 SMP.

Mengapa persoalan sampah di kota ini tak kunjung teratasi?

Di Kota pangkal pinang, masalah lingkungan, harus segera di atasi, terutama sampah yang menumpuk, tidak terkelola dengan baik. Bahkan baunya sering tercium sampai bandara, karena bersebelahan. Tumpukan sampah itu sampai terlihat dari pesawat kalau kita mau landing. Sampah ini tidak bisa terpecahkan.

Apa regulasi ideal untuk menertibkan pengembang perumahan yang menyebabkan banjir?

Publik area juga kurang, ada public area banyak diisi PKL, memang penataan kotanya tidak tertata. Ini terkait juga dengan pengembang perumahan yang asal-asalan membangun. Dampaknya banjir di beberapa perumahan banjir terus.

Apa penyebab tingginya biaya hidup di Pangkalpinang?

Pangkalpinang itu biaya hidup tinggi, logistic dari luar, inflasi cukup tinggi. Keluar masuk barang, pelabuhannya pasang surut, kalau surut kapal tidak bisa masuk tidak bisa sandar.

Keluar masuk kapal menunggu air pasang, cost kan jadi tinggi. Kapal-kapal yang besar juga tidak bisa sandar, tidak bisa masuk Pelabuhan.

Pasar juga tidak memadai, kumuh, banyak pasar tumpah, pasar kaget yang tidak terkelola dengan baik. Perkembangan kota tidak dibarengi dengan pembangunan pasar.

Antisipasi pemerintahnya lambat, daerah yang berkembang lambat dibangun pasar, sehingga banyak pasar-pasar kaget. Pasar kaget jadi permanen. Pasar induk pun terlalu sempit areanya, sebelumnya pasar retail yang dipaksakan jadi pasar induk. Pengelolanya pun masih dinas, belum BUMD. Tidak jelas penataannya.

Kawasan Peruntukan Industri di Pangkalpinang dinilai potensial. Apa langkah konkret Anda untuk menaikkan statusnya?

Pangkalpinang punya Kawasan Peruntukkan Industri, ini potensi kalau dinaikkan statusnya jadi Kawasan Industri. Apalagi kawasannya dekat, bersebelahan dengan Pelabuhan. Industrinya juga lumayan, berpotensi dikembangkan.

Daerah di sekitar Pangkalpinang, juga kaya mineral di luar timah, kalau mulai dikembangkan maka kebutuhan Kawasan industri penting. Tapi Kawasan ini harus ditopang Pelabuhan sehingga bisa terintegrasi. Ini pelabuhannya belum representative kawasannya masih peruntukan.

Peningkatan sumber daya manusia karena pangkalpinang kota, harus fokus pada perdagangan dan perindustrian. Sangat mungkin dilakukan di pangkal pinang.

Apalagi, perairan antara Bangka dan Belitung itu jalur perdagangan internasional, teramai, jalur Alki 1. Kapal yang mau masuk ke Jakarta pasti masuk perairan selat gaspar, begitu juga

dari Jakarta mau ke Singapura atau Laut China Selatan. Itu kapal yang melintas antara 10-15 menit sekali.

Pangkalpinang bisa menjadi semacam hub, kita pasok air, minyak, atau kebutuhan pangan bagi kapal yang melintas atau bersandar. Ini bisa juga kita mendorong agar pangkal pinang mendapat dana bagi hasil dari pemerintah pusat karena dilewati jalur ALKI 1.

Apa strategi Anda menjadikan kuliner lokal sebagai daya tarik wisatawan?

Potensi lainnya, bagaimana pangkalpinang menjadi pusat MICE, pertemuan, meeting, event. Kuliner di pangkalpinang juga menjadi daya Tarik, karena kuliner khas perpaduan tiongkok, melayu. Hari ini tidak dilakukan.

Kita misalkan, orang Jakarta mau ke pantai kalau ke Bali bisa 2 jam, tapi kalau ke pangkal pinang hanya 45 menit. Ini alternatif bagi orang Jakarta. Banyak orang-orang keturunan, hanya ke pangkalpinang karena rindu makanannya.

Saya punya konsep untuk akselerasi, bagaimana Pangkalpinang bisa menjadi tempat pertemuan. Karena potensinya sangat besar, sumber daya manusia, maupun sumber daya alam mendukung.

Mengapa masyarakat sulit mendapat pekerjaan dengan upah layak?

Yang paling utama pekerjaan. Pekerjaan di pangkal pinang tidak cukup, penghasilannya tidak UMR. UMR di sana itu nomor dua tertinggi di Indonesia, Rp3.876.600, tapi kontras dengan penghasilan masyarakatnya, orang bekerja di sana, non formal tidak mungkin bisa UMR. Seperti di coffe shop, dan lainnya tidak bisa UMR, paling setengah dari UMR.

Dukungan Mengalir untuk Prof. Udin–Dessy, Akar Rumput Pangkalpinang Suarakan Harapan Baru

Dukungan terhadap pasangan Saparudin Masyarif atau Prof. Udin dan Cece Dessy sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang terus mengalir dari berbagai kalangan. Dari pedagang kaki lima, warga perumahan, komunitas perempuan, hingga alumni dan tokoh agama, mereka menyuarakan harapan akan pemimpin yang hadir dan mendengar langsung.

Di kawasan Jembatan Emas, para pedagang kaki lima menyambut hangat kunjungan Prof. Udin. Ia tak hanya menyapa, tapi berdialog dan mencatat langsung keluhan mereka.

“Kehadiran saya di sini ingin mendengar, menyapa, dan mencari solusi bersama. PKL adalah wajah ekonomi rakyat,” ujar Prof. Udin, disambut antusias para pedagang yang merasa diperhatikan.

Pasangan Prof Udin – Dessy ini menekankan pentingnya mendengar langsung suara masyarakat. Prof. Udin menyampaikan komitmennya untuk bekerja dari bawah, bukan dari balik meja.

“Kami tidak datang untuk sekadar minta suara. Kami datang untuk mendengar, mencatat, dan bekerja. Insya Allah, jika kami diberi amanah, setiap kebijakan kami akan berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya janji-janji kosong,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari alumni lintas generasi SMA Sriwijaya dan komunitas pesantren, termasuk tokoh-tokoh Gontor dan Dewan Masjid Indonesia Babel, yang mendoakan dan memberi nasihat moral untuk tetap merakyat dan amanah.

Gaya kampanye yang menyentuh langsung warga membuat pasangan ini mendapat simpati luas. Dari pasar hingga pesantren, dari lapangan

senam hingga forum alumni, nama Prof. Udin dan Dessy terus digaungkan sebagai harapan baru Pangkalpinang.

Andry Haryanto



foto: Dok. Pribadi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PROF UDIN

II PENDIDIKAN

Sekolah Dasar

SD Negeri 5 Pangkalpinang, lulus tahun 1981.

Sekolah Menengah

- SMP Negeri 2 Pangkalpinang, lulus tahun 1984.

- SMA Sriwijaya Pangkalpinang, Bidang Ilmu-ilmu Fisika (A1), lulus tahun 1987.

Perguruan Tinggi

- Sarjana (S1) Pendidikan Matematika, Universitas Sriwijaya, lulus tahun 1993.

- Magister (S2) Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung, bidang keahlian Software Engineering on Image Processing and Computer Vision, lulus tahun 2000.

- Doktor Falsafah (S3) Computer Science, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), bidang keahlian Image Processing, Computer Vision and Pattern Recognition, lulus tahun 2012.

- Doktor Falsafah (S3) Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Darussalam Gontor, on going.

III ORGANISASI

1. Anggota PDI Perjuangan, No KTA 19710210051204690001, tahun 2022
2. Ketua Relawan Milenial Ganjar-Mahfud Provinsi Bangka Belitung 2024
3. Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 s.d. 2022.
4. Member of IEEE, Indonesia Section, 2014 s.d. sekarang.
5. Pengurus Dewan TIK (DETIKDA) Provinsi Sumatera Selatan, 2014 s.d. 2019.
6. Ketua Pengurus Daerah Catur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013 s.d. 2018.
7. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Sukaraja, Buay Madang, OKU Timur, Sumatera Selatan, 2006 s.d. sekarang.
8. Member of IAES (Institute of Advanced Engineering and Science) Hongkong, 2014 s.d. sekarang.
9. Ketua Bidang Teknologi Informasi Ikatan Alumni ITB Sumatera Selatan 2002-2007.
10. Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Prov. Kep. Bangka Belitung, periode 2022-2027.
11. Ketua Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Prov. Kep. Bangka Belitung, Okt. 2021 s.d. sekarang.

IV PEKERJAAN

1. Dosen Tidak Tetap pada Program Studi S3 Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Oktober 2023 - Desember 2023.
2. Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Kalbu Intan Medika (KIM) Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Desember 2022 - sekarang.
3. Direktur Utama PT. Bangsaku Meta Medika, Maret 2022 - sekarang.
4. Komisaris Utama PT. Babel Meta Investama, Mei 2022 - sekarang.
5. Penguji Tamu (Thesis Examiner) Mahasiswa Doktorat (Computer Sciences & Engineering) di Visvesvaraya Technological University (VTU), Jnana Sangama, Belagavi- 590 018, Karnataka State, India, Sept - Nov 2021.
6. Direktur Utama PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera BUMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Feb 2019 - Mei 2022.
7. Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Oktober 2018 - Mei 2022.
8. Dosen Tetap Program Studi S3 Informatika, Telkom University, Bandung, Maret 2020 - sekarang.
9. Dosen Tidak Tetap Non PNS Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, tahun Maret 2019 - 2021.
10. Komisaris PT. Hansai Investama, 2018 - sekarang.
11. Penguji Tamu Ujian Akhir Mahasiswa Magister dan Doktorat di Management Science University (MSU) Malaysia dan University Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia, 2018 - 2019.
12. Tenaga Pengajar Tidak Tetap di Program Studi Magister Manajemen STIE PERTIBA Pangkalpinang, 2018 - sekarang.
13. Anggota Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, tahun 2020 - sekarang.

I IDENTITAS

Nama Lengkap

Prof. Ir. Drs. H. Saparudin, M.T., Ph.D.

Tempat Lahir

Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tanggal Lahir

12 April 1969

Agama

Islam

Jenis Kelamin

Laki-laki

Status Pernikahan

Menikah

Alamat Rumah

Jalan Sumedang No. 146, RT 01, RW 02, Kel. Kejaksaan, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Contact

+62-811-712024

Email

saparudinmasyarif@gmail.com

Indonesia Diantara Pusaran Konflik Iran-Israel dan Kebijakan Trump



Eskalasi geopolitik perang Iran – Israel terus memanans. Konflik yang berawal dari dukungan Iran terhadap Palestina, ini memicu perang selama 12 hari dan berdampak pada banyak negara termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah mewaspadai dampak lanjutan dari eskalasi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia, sebagai dampak perang Irak-Israel, hingga perang dagang Amerika-China yang dipicu kebijakan Donald J Trump dengan menaikkan pajak masuk barang kenaageranya.

“Pemerintah mewaspadai dampak lanjutan dari eskalasi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Perang Iran-Israel, perang dagang Amerika Serikat-China, serta kebijakan fiskal Washington yang ekspansif menjadi pemicu pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di

kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025)

Perang Irak vs Israel telah menyebabkan lonjakan harga minyak hampir 9 persen dari kisaran 75 dollar AS per barel. Ketegangan tersebut menimbulkan gejolak pada nilai tukar dan suku bunga global, termasuk Indonesia.

Ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran masih menjadi perhatian semua negara dunia, karena Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang menyuplai sekitar 20% kebijakan pasokan minyak bumi dunia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tri Winarno mengatakan pihaknya masih memantau wacana penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Mengingat, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diambil.

“Kalau misalnya itu kan ada beberapa dampak atau potensi ya. Maksudnya masih potensi,” kata Tri di Kementerian ESDM, Selasa (24/6/2025).

Selain itu Tri mengakui bahwa sebagian besar impor minyak mentah RI berasal dari Arab dan melewati selat Hormuz. Namun, hingga kini ia memastikan belum ada rencana untuk mengalihkan impor minyak dari negara tersebut meski kondisi masih memanans.

Disisi lain Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRICS saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang dominasi negara Barat seperti Amerika Serikat dalam tatanan ekonomi dunia. Namun dampak dari itu Donald trump menetapkan tarif produk Indonesia yang masuk ke Amerika naik menjadi 32 persen.

Eka Permadhi



foto: wartaphoto.net

Budaya, Syariat, dan Dentuman yang Mengusik

Di tengah semarak musik jalanan dan arak-arakan yang meramaikan desa hingga kota kecil di Jawa Timur, fenomena *sound horeg* muncul sebagai simbol ekspresi budaya anak muda. Dentuman musik keras dari truk-truk modifikasi bukan sekadar menimbulkan suara yang memekakkan telinga, namun juga memicu kontroversi sosial dan perdebatan nilai.

Sebagian kalangan menilai ini sebagai bentuk kreativitas dan solidaritas komunitas, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman terhadap moralitas dan ketertiban umum. Pertanyaannya, bagaimana agama memandang fenomena ini? Se jauh mana budaya lokal dapat memberi ruang bagi ekspresi semacam ini tanpa melukai nilai-nilai etika dan spiritual masyarakat?

Istilah *sound horeg* merujuk pada rangkaian sound system berdaya tinggi yang dipasang di

atas truk, disetel dengan volume ekstrem hingga menimbulkan getaran hebat. Dalam praktiknya, iring-iringan ini menjadi bagian dari karnaval atau arak-arakan yang diwarnai dengan joget massal antar peserta, termasuk ikhtilat atau percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan.

Forum Bahtsul Masail yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, membahasnya secara mendalam. Rais Syuriah PBNU, KH. Muhibbun Aman Aly, menegaskan bahwa *sound horeg* dihukumi haram, tanpa bergantung pada gangguan suara atau regulasi pemerintah.

“Kami putuskan perumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya disebut dengan *sound horeg* bukan sound system,” jelas beliau.

Ketua Bidang Fatwa MUI, Prof. Asrorun Niam Sholeh, mendukung keputusan ini. Ia mengatakan, “Mengingat ada mafsadah yang ditimbulkan

dari aktivitas *sound horeg* tersebut yang harus dicegah dan itu kontekstual. Karenanya, hukum keagamaan yang ditetapkan harus dipahami utuh lengkap dengan konteksnya.”

Alasan mendasar pengharaman antara lain: pertama, *sound horeg* dianggap sebagai *syar'u al-fussāq* (simbol perilaku menyimpang); kedua, joget massal yang menghilangkan batas sopan santun; ketiga, *ikhtilāt* yang tak terkendali. Dampak lainnya meliputi gangguan kesehatan, kemacetan, hingga kerusakan fasilitas umum.

Dalam fikih, kaidah *adh-dharar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) menjadi dasar hukum penting, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan kerusakan dan tidak boleh membalas kerusakan.” (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ ضَارَّ صَارَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Barang siapa menimbulkan kerusakan, maka Allah akan membalasnya dengan kerusakan; dan siapa yang menyulitkan (orang lain), maka Allah akan menyulitkannya.” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak).

Artinya, tindakan yang merugikan orang lain dilarang keras dalam Islam.

Namun demikian, penting ditegaskan bahwa Islam tidak anti hiburan. Nabi SAW membolehkan seni, syair, bahkan nyanyian selama tidak melanggar syariat. Contohnya, saat Rasulullah SAW tiba di Madinah dan disambut dengan syair:

طَلَعَ الْبَذْرُ عَلَيْنَا ... مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوُدَاعِ

وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ... مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ

“*(Telah hadir Rasulullah Saw yang laksana bulan purnama kepada kita, dari arah Tsaniyah al-Wada`. Kita wajib bersyukur, selama pendoa berdoa kepada Allah.)*”

Syair ini menunjukkan bahwa kegembiraan dan ekspresi budaya diperbolehkan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam. Berbeda dengan *sound horeg* yang justru mengandung unsur makasiat seperti aurat terbuka, sentuhan non-mahram, dan musik berlebihan.

Fenomena ini menuntut kita menilai ulang: apakah ini ekspresi budaya yang harus dilestarikan atau euforia sesaat yang menyesatkan?

Hiburan Positif dalam Bingkai Budaya Jawa Timur

Masyarakat seharusnya menengok kembali khazanah budaya lokal yang ramah nilai. Tanpa mematikan kreativitas, Jawa Timur punya banyak bentuk hiburan yang santun dan menghibur.

Misalnya, hadrah dan shalawatan di pesantren dan kampung-kampung. Grup rebana yang membawakan Simthud Durar atau Qasidah Burdah mampu menciptakan kegembiraan kolektif tanpa melanggar adab. Begitu juga dengan tradisi syukuran seperti sedekah bumi dan ruwatan desa yang dibalut doa dan seni santri.

Hiburan semacam ini tak hanya menanamkan rasa syukur, tapi juga memperkuat solidaritas dan akhlak. Generasi muda tetap bisa kreatif, selama diarahkan agar selaras dengan etika dan spiritualitas Islam.

Dengan memodifikasi tradisi secara kontekstual, masyarakat Jawa Timur mampu menciptakan hiburan alternatif yang lebih sehat, membangun, dan sesuai syariat.

Rizky Zulkarnain

Ekonomi di Persimpangan: Antara Astacita dan Realitas

Suara lirih terdengar dari seorang pria jangkung kurus berambut panjang. “Sekarang sepi, pak. Orang belanja perlengkapan outdoor enggak kayak dulu. Sekarang bisa nutup duit kontrakan kios saja udah lumayan,” ujar Ranu.

Ranu adalah nama panggilan yang juga dia sematkan untuk kios berjualan beragam keperluan adventure bagi para pecinta alam dan aktivitas ekstrim di seputaran Cibinong, Kabupaten Bogor. Ranu tidak sendiri. Dia bercerita, kondisi serupa juga dialami beberapa rekannya yang menggeluti usaha yang sama.

“Banyak yang tutup,” kata dia.

Cerita Ranu adalah satu dari sekian banyak potret ekonomi riil yang kini terasa semakin dingin. Ia bukan sekadar keluhan personal, tapi gema dari gejala struktural yang menggerogoti perekonomian nasional.

Kisah Ranu rupanya senada dengan pernyataan mengejutkan yang datang dari Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono. Ia menyebut bahwa ekonomi Indonesia terus menurun, bahkan berada di titik terendah sejak tahun 1970-an. Pernyataan Dicky memang tidak

sepenuhnya mewakili Bank Indonesia di mana dia mengabdikan. Dia menyampaikan hal tersebut saat uji kelayakan calon Deputy Gubernur BI, Selasa 1 Juni 2025, di Senayan, Jakarta.

Bukan sekadar alarm, kondisi saat ini adalah sirene panjang tanda darurat. Dan yang lebih ironis, peringatan itu keluar di tengah gelombang optimisme politik yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir dengan gagasan besar yang mereka sebut “Astacita”, delapan cita-cita besar bangsa. Visi mereka mengelora: industrialisasi, swasembada pangan, hilirisasi tambang, makan bergizi gratis. Namun realitas di lapangan jauh dari gegap gempita.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan lebih dari 26 ribu tenaga kerja terkena PHK hingga Mei 2025. Apindo bahkan memperkirakan jumlahnya mendekati 74 ribu. Di balik angka itu, ada wajah-wajah cemas para buruh pabrik, karyawan startup, dan supir logistik yang kini mengisi antrean panjang kartu kuning.

Kelas menengah, yang digadang-gadang menjadi mesin pertumbuhan konsumsi, justru

mulai runtuh. Survei T-REC menunjukkan hampir 49 persen dari mereka mengalami penurunan daya beli. Banyak dari mereka yang dulu mampu membeli barang bermerek, kini mulai berhitung ulang untuk sekadar belanja mingguan.

Lalu, bagaimana mungkin negara yang ekonominya melemah bisa mengejar target pertumbuhan delapan persen?

Apakah mimpi besar bisa berdiri di atas pondasi yang retak?

Pemerintah mencoba menjawab dengan efisiensi fiskal. Pemangkasan anggaran senilai Rp306 triliun diumumkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Pendingin ruangan di kantor kementerian dimatikan. Perjalanan dinas dipangkas. Proyek infrastruktur direm. Namun efisiensi yang tak disertai strategi pemulihan malah memperlambat perputaran uang di daerah.

Gibran, yang semula digadang menjadi ikon muda penuh terobosan, kini lebih sering terlihat mengunjungi acara makan gratis dan menyapa anak-anak sekolah. Ia belum tampak sebagai motor penggerak arah kebijakan ekonomi. Padahal, rakyat menunggu lebih dari sekadar senyum ramah dan konten viral.

Sementara itu, koordinasi antarkementerian berjalan dengan tempo masing-masing. Kabinet yang gemuk justru menambah beban birokrasi. Banyak kebijakan strategis kehilangan arah karena tidak punya komando yang jelas. Di tengah turbulensi global, Indonesia butuh nahkoda, bukan sekadar kru kapal yang sibuk memoles dek.

Yang paling mengkhawatirkan adalah menyusutnya kelas menengah. Dalam lima tahun terakhir, hampir 10 juta orang terlempar dari zona aman menuju jurang rentan. Mereka kehilangan pekerjaan, tak lagi mampu mencicil rumah, bahkan terpaksa menarik anak dari sekolah swasta. Jika mereka tak dipulihkan, maka

krisis ini tak hanya soal angka pertumbuhan, tapi juga kehancuran harapan.

Kritik terhadap kebijakan ekonomi bukan untuk menjatuhkan. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan nurani agar negara meninjau ulang peta jalannya. Janji tanpa realisasi adalah utopia. Realisasi tanpa empati adalah otoritarianisme ekonomi.

Pemerintah perlu mengubah pendekatan. Pertama, evaluasi mendalam terhadap program makan gratis, apakah ia berdampak langsung pada gizi dan angka partisipasi sekolah, atau sekadar konsumsi populis?

Kedua, Gibran harus turun langsung dalam komunikasi kebijakan, tidak hanya sebagai wajah muda tapi juga sebagai otak muda.

Ketiga, anggaran harus mengalir ke sektor produktif UMKM, pertanian, dan manufaktur padat karya. Insentif fiskal bisa menyasar pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Keempat, hilirisasi tak boleh hanya mengejar ekspor nikel mentah, tapi juga membangun rantai pasok yang berpihak pada nilai tambah domestik.

Terakhir, dan yang paling penting: bangun kembali kepercayaan rakyat. Buka data, jujur soal capaian dan tantangan. Akui kelemahan, perbaiki dengan kerendahan hati. Rakyat tidak butuh pemimpin sempurna, mereka hanya ingin dipimpin oleh yang mau mendengar.

Cerita-cerita seperti itu bukan hanya anekdot. Mereka adalah alarm sosial. Pemerintah harus peka. Karena jika tidak, yang runtuh bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Tapi kepercayaan. Dan kalau itu yang terjadi, tidak akan ada astacita yang mampu menyelamatkan kita.

Bangsa besar adalah bangsa yang berani bercermin. Kita belum terlambat. Tapi waktu terus berjalan. Dan keheningan terlalu mahal untuk dibayar dengan derita rakyat.

Andry Haryanto



Daftar 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

Sebanyak 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis, 10 Juli 2025. Penunjukan terbaru di antaranya melibatkan wakil menteri yang menduduki posisi komisaris di subholding PT Pertamina (Persero).

Beberapa di antaranya adalah Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang kini menjadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE); Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi, sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga; serta Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri, yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). Selain itu, Wamenpora Taufik Hidayat kini menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Kabinet Merah Putih sendiri terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian, termasuk beberapa kementerian baru hasil penggabungan atau perubahan nomenklatur dari kabinet sebelumnya.

Praktik rangkap jabatan ini menuai kritik dan menjadi bahan perdebatan publik. Meskipun Mahkamah

Konstitusi secara eksplisit melarang menteri merangkap jabatan, banyak kalangan menilai semangat larangan tersebut seharusnya juga berlaku bagi para wakil menteri. Kekhawatiran pun muncul soal potensi konflik kepentingan, beban etika, hingga indikasi politisasi jabatan.

Berikut daftar lengkap 30 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris di berbagai BUMN:

1. Stella Christie – Komisaris PHE
2. Ferry Juliantono – Komisaris Patra Niaga
3. Arif Havas Oegroseno – Komisaris PIS
4. Taufik Hidayat – Komisaris PLN EPI
5. Veronica Tan – Komisaris Citilink
6. Bambang Eko Suhariyanto – Komisaris PLN
7. Sudaryono – Komisaris Utama Pupuk Indonesia
8. Giring Ganesha – Komisaris GMF Aero Asia
9. Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama Telkom
10. Ossy Dermawan – Komisaris Telkom
11. Immanuel Ebenazer – Komisaris Pupuk Indonesia
12. Silmy Karim – Komisaris Telkom
13. Fahri Hamzah – Komisaris BTN
14. Suahasil Nazara – Komisaris PLN
15. Aminuddin Ma'ruf – Komisaris PLN
16. Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama BRI
17. Helvy Yuni Moraza – Komisaris BRI
18. Diana Kusumastuti – Komisaris Utama Brantas Abipraya
19. Yuliot Tanjung – Komisaris Bank Mandiri
20. Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama Perikanan Indonesia
21. Suntana – Komisaris Utama Pelindo
22. Dante Saksono – Komisaris Pertamina Bina Medika
23. Donny Ermawan Taufanto – Komisaris PT Dahana
24. Christina Aryani – Komisaris Semen Indonesia
25. Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama Telkomsel
26. Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris Dayamitra Telekomunikasi Tbk
27. Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama Sarinah
28. Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama Pertamina
29. Juri Ardiantoro – Komisaris Utama Jasa Marga
30. Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel

Rizky Zulkarnain

Dorongan Pemakzulan Gibran Dan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Perkuat Kepemimpinan Prabowo

Direktur Program Pusat Polling (Puspol) Indonesia Chamad Hojin melihat polemik pemakzulan Gibran, keluarga Solo hingga akun fufufafa, justru semakin menguatkan kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Bahwa ada pemak-pemik terkait Gibran saat proses pencalonan sebagai wakil presiden yang dinilai merusak Konstitusi dengan Keputusan MK, tapi itu kelompok kecil, bahkan sebetulnya memperkuat Pak Prabowo sendiri. Serangan itu bukan ke Pak Prabowo lebih ke Pak Jokowi dan keluarganya," kata Hojin kepada aktual.com, Sabtu (12/7/2025)

Tak hanya itu, Hojin melihat, tuduhan ijazah palsu Jokowi, dan usulan purnawirawan jenderal yang meminta pemakzulan Gibran, lebih menguntungkan Prabowo ketimbang mengganggu jalannya pemerintahan.

Ia pun melihat kinerja pemeritahan seperti Kejaksaan Agung yang terus mengungkap kasus mega korupsi, mulai berjalannya MBG, Kenaikan gaji ASN, hingga menguatnya dukungan politik yang terlihat dari membaiknya komunikasi dengan PDIP.

Erobi Jawi Fahmi, Eka Permadhi

Polemik Ijazah Jokowi: Drama Forensik di Mabes Polri

foto: aktual.com/HQ



Seperti hantu lama yang enggan pergi, isu ijazah Presiden Joko Widodo kembali gentayangan. Tidak peduli sudah berulang kali dijelaskan, dipublikasikan, bahkan dilegalisasi, tuduhan 'ijazah palsu' ini kembali hidup, kali ini bukan di forum WhatsApp grup keluarga atau kanal YouTube konspirasi, melainkan langsung di meja gelar perkara khusus Bareskrim Mabes Polri.

Suasana di Mabes Polri, Rabu 9 Juli 2025, semarak saat kasus ijazah Presiden Jokowi digelar. Kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan, dikelilingi kamera wartawan sambil menegaskan bahwa Puslabfor Polri sudah menegaskan ijazah tersebut asli.

"Puslabfor sudah menyimpulkan ijazah Jokowi asli," ujar Yakup santai. "lebih percaya mana, Puslabfor atau laboratorium Roy Suryo?"

Menurut Yakup, memperlihatkan ijazah asli pun tak berguna karena pihak penggugat akan tetap menganalisisnya lagi.

Di sudut lain, ahli telematika Roy Suryo berupaya mempertahankan argumennya dengan analogi-analogi dramatis. Ia mengkritik pernyataan jenazah, jenazah perlu dihadirkan, kan tidak cukup hanya visum, karena visum bisa salah. Maka ijazahnya harusnya dihadirkan," Roy menegaskan.

"UGM itu hanya melegalisasi, jadi bukan menyatakan asli, analogi yang sangat konyol," cetus Roy.

Dia bahkan menyamakannya dengan kasus autopsi jenazah. "Kalau misalnya pemeriksaan jenazah, jenazah perlu dihadirkan, kan tidak cukup hanya visum, karena visum bisa salah. Maka ijazahnya harusnya dihadirkan," Roy menegaskan.

Ketua TPUA Eggi Sudjana memilih walk out saat gelar perkara disidangkan. Eggi frustrasi karena pihak Jokowi tidak bisa memperlihatkan bukti fisik ijazah asli saat itu.

Rekan satu timnya, ahli forensik digital, Rismon Sianipar, menyesalkan ketidakhadiran Jokowi dan pihak UGM yang menurutnya sangat penting untuk meyakinkan publik.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan Pak Jokowi dan ketidakhadiran pihak UGM yang seharusnya bisa menjelaskan atau meyakinkan publik," keluh Rismon.

Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah menambahkan, penyidik Bareskrim tidak memberi bukti baru apapun. Dia menilai apa yang dijelaskan penyidik sama persis seperti konferensi pers Mei lalu.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Jokowi tetap tenang dan menilai gelar perkara khusus ini sudah sangat jelas mengakhiri perdebatan. Yakup Hasibuan menegaskan Bareskrim hanya menjelaskan proses penyelidikan yang sudah berlangsung, bukan menguji ulang ijazah.

Yakup menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah memverifikasi ijazah tersebut. Sehingga tidak ada tindak pidana yang ditemukan.

"Ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi," kata dia.

Dengan percaya diri, pihak Jokowi menyerahkan sepenuhnya otoritas kepada lembaga forensik resmi, berharap dengan begitu kontroversi ijazah bisa berakhir.

Kronologi Riuh Gelar Perkara

22 Mei 2025, Bareskrim Polri mengumumkan hasil penyelidikan kasus ijazah Jokowi. Dokumen asli ijazah tahun 1985 diuji laboratoris bersama ijazah para mahasiswa pembanding, dan hasilnya identik. Sehingga penyidik berkesimpulan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini.

2 Juli 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengirim surat ke Polri meminta penjadwalan ulang gelar perkara khusus. Mereka ingin melibatkan nama-nama tambahan (seperti Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dll.) dalam proses tersebut. Polri kemudian menjadwalkan ulang gelar perkara dari tanggal semula 30 Juni menjadi 9 Juli 2025.

9 Juli 2025, Pukul 10.00: Gelar perkara khusus digelar di Bareskrim Mabes Polri. Tim TPUA lengkap hadir, mereka adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Eggi Sudjana, Tifauzia Tyasuma, serta anggota timnya.

Sementara itu, Jokowi dan pihak universitas (UGM) tidak hadir yang kemudian dipersoalkan oleh pihak penggugat.

Pertengahan Sidang: Ketua TPUA Eggi Sudjana walk-out meninggalkan acara. Eggi kecewa karena kuasa hukum Jokowi tidak menampilkan ijazah fisik asli seperti yang diminta. Saat itu, Eggi menegaskan, tanpa ijazah asli di hadapan penyidik, kasus ini sulit dianggap selesai.

Andry Haryanto

Misteri Uang dan Keadilan: Saat Kasus CPO Menyeret Hakim, Pengacara, dan Buzzer ke Kursi Terdakwa

Di bawah langit mendung Jakarta, lima orang tersangka digiring ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Di antara mereka ada nama-nama yang tak asing: pengacara korporat, mantan jurnalis, dan seorang buzzer ternama. Hari itu, negara resmi menyerahkan mereka kepada proses hukum—bukan karena tindak pidana ringan, melainkan karena mereka diduga menjadi bagian dari skema besar: menyuap majelis hakim untuk membebaskan tiga raksasa sawit dari jeratan hukum.

Di ruang pertemuan Kejari, para jaksa menerima berkas pelimpahan tahap kedua dari Kejaksaan Agung. Di dalamnya terdapat dokumen perkara yang membelit nama-nama seperti Marcella Santoso, Ariyanto Bakrie, Tian Bahtiar, Junaedi Saibih, dan M. Adhiya Muzakki. Tuduhananya berat: mengatur suap dan menghalangi penyidikan dalam kasus ekspor crude palm oil (CPO) yang disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Di Balik Vonis Lepas

Awalnya, ini hanyalah perkara hukum seperti biasa—setidaknya di permukaan. Tiga perusahaan besar: Wilmar Group, Musim Mas, dan Permata Hijau Group dituduh menyalahgunakan fasilitas ekspor CPO pada tahun 2022. Negara mengklaim kerugian hingga Rp17,7 triliun, terutama karena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng kala itu.

Namun, publik tercengang ketika pada Maret 2025, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus para korporasi tersebut “lepas dari tuntutan hukum”. Vonis itu artinya: perbuatan mereka diakui terjadi, tetapi tidak bisa dihukum. “Ontslog van rechtsvervolging,” kata putusan itu.

Tapi kecurigaan segera merebak. Mengapa fakta-fakta di persidangan, termasuk bukti audit dan pengakuan saksi, tak cukup untuk menjatuhkan hukuman? Dalam diam, Kejaksaan mulai menyelidiki lebih dalam. Tak butuh waktu lama sampai jejak uang mulai terendus.

Uang, Diam, dan Tangan di Balik Layar

Jaksa menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi beberapa hakim. Diduga, Rp60 miliar mengalir kepada Wakil Ketua PN Jakpus, Muhammad Arif Nuryanto. Tiga hakim anggota dikabarkan berbagi Rp22,5 miliar lainnya. Uang itu, kata jaksa, berasal dari korporasi yang dibela oleh Marcella dan Ariyanto, dua pengacara yang kini duduk sebagai tersangka.



foto: aktual.com

Namun jaringan itu tak berhenti di ruang sidang. Ketika penyidikan mulai menyentuh tokoh-tokoh di balik layar, muncul strategi “pengamanan opini publik.” Di sinilah Tian Bahtiar, mantan Direktur Pemberitaan JakTV, dan M. Adhiya Muzakki, pimpinan tim buzzer, masuk panggung. Mereka dituduh membantu menutupi jejak dan membangun narasi untuk melemahkan penyidikan—termasuk melalui tekanan di media sosial dan serangan terhadap jaksa penuntut.

Jaksa menyebutnya sebagai “perintang keadilan.” Undang-Undang Tipikor menyebut perbuatan ini sebagai pelanggaran serius, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perkara korupsi, para pelaku diseret ke pengadilan bukan hanya karena menerima atau memberi suap, tetapi juga karena menghalangi jalannya keadilan.

Bukti Tak Lagi Titipan

Satu hal menarik dalam perkara ini adalah status uang yang semula hanya “titipan” dari tiga korporasi. Totalnya mencapai hampir Rp13,8 triliun, diserahkan secara sukarela ke Kejaksaan saat proses hukum bergulir. Awalnya, ini dipandang sebagai bentuk itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

Namun kini, uang tersebut tak lagi bersifat titipan. Setelah putusan vonis lepas, Kejaksaan mengubah statusnya menjadi barang sitaan, dengan izin pengadilan. Artinya, negara menahan dana itu secara sah untuk dimasukkan ke dalam memori kasasi—sebagai bukti bahwa perkara belum selesai dan putusan lepas harus dibatalkan.

Di ruang kas negara, uang itu kini tercatat rapi. Tapi di mata publik, yang lebih penting adalah kejelasan: apakah keadilan benar-benar ditegakkan?

Andry Haryanto

Beasiswa Santri

PP Raudhatul Ihsan

setiap huruf yang dipelajari dan dibaca santri akan menjadi amal jariyah penerang kubur.
setiap rupiah yang disedekahkan akan bermanfaat buat masa depan para santri.

Paket Beasiswa I

Beasiswa adik santri
setingkat SMP/SMA

HANYA DENGAN

Rp. 300.000

Paket Donasi II

Beasiswa adik santri
yang melanjutkan S1

HANYA DENGAN

Rp. 700.000

DONASI SEGERA

Bank Syariah Indonesia
7137-909-922
Yay Arraudhah QQ Lazar Sedekah

☎ 0877 6321 7445 | www.lazarindonesia.org |   Laz Ar Raudhah




Alhamdulillah
sudah gajian

cukup **2,5%**
apapun profesinya

Bank Syariah Indonesia
7137 909 744
Yay Arraudhah QQ Zakat



☎ 0877 6321 7445 | www.lazarindonesia.org |   Laz Ar Raudhah

Haji ONH PLUS

BIMBINGAN: KH. MUHAMMAD DANIAL NAFIS

25 HARI



KUOTA RESMI
KEMENAG

SYARAT
PENDAFTARAN

1. Setoran awal \$5.000
2. E-KTP
3. Kartu Keluarga
4. Buku Nikah
5. Foto Close-Up
6. Mengisi Formulir Pendaftaran
7. Tanda tangan MOU
8. Surat Kuasa
9. Surat Pernyataan

HARGA SUDAH TERMASUK

- Akomodasi
- Visa Haji (Validitas 30-hari)
- Tiket penerbangan kelas ekonomi (PP)
- Makan 3 kali sehari (Prasmanan Indonesia)
- Tur, ziarah, dan transportasi bus AC
- Guide (Muthawwif)
- Air zamzam 5 liter / pax
- Perlengkapan (Travel bag besar & kecil, tas paspor & sandal, ihram & mukena, dan seragam nasional berwarna hijau dan ungu)
- Dokter pendamping, obat – obat generik

HARGA BELUM TERMASUK

- Pengeluaran pribadi
- Tur di luar program yang telah disusun
- Dam & qurban
- Cek kesehatan & buku kesehatan
- Suntik Meningitis (Suntik Influenza opsional)
- Transportasi dari / ke daerah asal

*estimasi biaya akan disesuaikan pada tahun keberangkatan

*langsung dapat nomor porsi antrian haji

*biaya pelunasan setelah ada keputusan Tarif Resmi dari Kemenag Indonesia yang akan diumumkan pada tahun keberangkatan

*Harga jadwal, program, fasilitas dapat berubah sewaktu - Waktu menyesuaikan kondisi aktual serta kebijakan Pemerintah Saudi & Indonesia

*Syarat & Ketentuan berlaku



Hotel Madinah ★★★★★
Sofitel Shod
/ Setaraf



Hotel Mekkah ★★★★★
Aziziyah Hotel
/ Setaraf



LUXURY

- ▶ Quad \$ 16.000
- ▶ Triple \$ 17.000
- ▶ Double \$ 18.000
- ▶ DP \$ 4.000



PREMIUM

- ▶ Quad \$ 12.000
- ▶ Triple \$ 13.000
- ▶ Double \$ 14.000
- ▶ DP \$ 4.000

MADRASAH HAJI
SELAMA DITANAH SUCI

TRANSIT

MAKTAB
HAJI PLUS

Aziziyah Hotel

VIP



Official Harmoni
0878-8880-7811



Maskapai:

